JURNAL AKUNTANSI
Vol.20 No.2 Oktober 2026 : 205 - 234
Doi: https://doi.org/10.25170/jak.v20i2.8287

ISSN : 2580-9792 (Online)
ISSN : 1978-8029 (Print)

PENGARUH KAPASITAS FISKAL DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN: KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN SDG 1 PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

THE EFFECT OF FISCAL CAPACITY AND CAPITAL EXPENDITURE ON POVERTY RATE: CONTRIBUTION TO THE ACHIEVEMENT OF SDG 1 IN PROVINCIAL GOVERNMENTS IN INDONESIA

Agustin Aulia Farda*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kapasitas fiskal dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan sebagai indikator invers capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke-1 serta menguji peran mediasi akuntabilitas keuangan pada pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel sebanyak 34 provinsi periode 2020–2024 (N=170). Data penelitian bersumber dari DJPK Kementerian Keuangan, BPS, dan IHPS BPK RI. Analisis dilakukan menggunakan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dan belanja modal berpengaruh negatif signifikan pada tingkat kemiskinan, mengindikasikan kontribusi nyata terhadap capaian SDG 1. Akuntabilitas keuangan berbasis opini BPK tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan dan tidak memediasi hubungan fiskal terhadap kemiskinan. Model memiliki kemampuan prediksi yang baik (R^2=0,591) dan model fit yang sesuai (SRMR=0,071; NFI=0,935; BIC=−121,999). Penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas belanja modal merupakan instrumen strategis percepatan capaian SDG 1. Akuntabilitas keuangan perlu dikembangkan dari orientasi pelaporan menuju akuntabilitas berbasis kinerja dan *outcome* pembangunan.

Kata Kunci: kapasitas fiskal, belanja modal, tingkat kemiskinan, SDG 1, akuntabilitas keuangan, PLS-SEM.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of fiscal capacity and capital expenditure on the poverty rate, an inverse indicator of the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 1, and to examine the mediating role of financial accountability in Indonesian provincial governments. This study uses a quantitative approach with panel data covering 34 provinces over the 2020–2024 period (N=170). The research data were obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance, the Central Statistics Agency (BPS), and the semester audit reports (IHPS) of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The analysis was conducted using Partial Least Squares-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) with SmartPLS 4.0. The

*Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Brawijaya, Indonesia, *email*: agustinauliafarda@gmail.com
Penulis Korespondensi: Agustin Aulia Farda
Sitasi: Farda, A. A. (2026). Pengaruh Kapasitas Fiskal dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan: Kontribusi terhadap Capaian SDGs Goal 1 pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Vol* (No), halaman.
Artikel masuk: 8 Agustus 2026; Artikel diterima: 27 Agustus 2026

results show that fiscal capacity and capital expenditure have a significant negative effect on the poverty rate, indicating a meaningful contribution to achieving SDG Goal 1. Financial accountability, based on BPK audit opinions, has no significant effect on the poverty rate and does not mediate the relationship between fiscal variables and poverty. The model has good predictive ability (R^2=0.591) and an appropriate model fit (SRMR=0.071; NFI=0.935; BIC=−121.999). Strengthening fiscal independence and improving the quality of capital expenditure are strategic instruments for accelerating progress toward SDG Goal 1. Financial accountability needs to be developed from a reporting orientation to performance- and outcome-based accountability.

***Keywords**: fiscal capacity, capital expenditure, poverty rate, SDG 1, financial accountability, PLS-SEM.*

1. PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan paling mendesak secara global. Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), isu kemiskinan ditetapkan sebagai tujuan kesatu, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh penjuru dunia (United Nations, 2023). Bagi Indonesia, pencapaian SDG tujuan 1 (selanjutnya disingkat SDG 1) bukan hanya komitmen internasional, melainkan merupakan tanggung jawab pembangunan nasional dan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), tingkat kemiskinan nasional pada September 2023 masih mencapai 9,36% atau sekitar 25,9 juta jiwa. Kondisi ini kontras dengan total anggaran daerah seluruh provinsi yang melampaui Rp1.100 triliun pada tahun 2023 (DJPK Kemenkeu, 2024), yang menunjukkan paradoks antara pertumbuhan fiskal dan capaian pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian SDG 1. Sebagian besar pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dilaksanakan melalui kebijakan fiskal daerah. Meskipun kapasitas fiskal daerah terus berkembang melalui peningkatan pendapatan daerah dan transfer fiskal, kemiskinan masih menunjukkan kesenjangan yang lebar antarprovinsi. Sebagian provinsi dengan kapasitas anggaran besar belum mampu menurunkan kemiskinan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan penting dalam hubungan antara kapasitas

fiskal, kualitas alokasi belanja, dan hasil pembangunan. Dengan kata lain, besarnya sumber daya fiskal belum selalu berbanding lurus dengan capaian pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pengurangan kemiskinan.

Kapasitas fiskal, yang diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, mencerminkan kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri. Berdasarkan teori *fiscal federalism* (Oates, 1972), desentralisasi fiskal memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien sesuai kebutuhan lokal. Daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih tinggi memiliki ruang kebijakan yang lebih besar untuk merancang program pembangunan sesuai kebutuhan lokal, termasuk program pelayanan dasar, infrastruktur publik, perlindungan sosial, serta ekonomi produktif yang dapat menurunkan kemiskinan (Tirtosuharto, 2022).

Selain kapasitas fiskal, belanja modal merupakan instrumen fiskal daerah yang berperan penting dalam pengurangan kemiskinan. Belanja modal menghasilkan aset publik, seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, irigasi, dan infrastruktur ekonomi yang dapat memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi (Nurias et al., 2023). Berdasarkan konsep *value for money* (Moore, 1995), belanja modal yang produktif menghasilkan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, efektivitas kapasitas fiskal dan belanja modal dalam menurunkan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari aspek akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas keuangan, yang tercermin dari opini audit BPK, diharapkan dapat memperkuat efektivitas penggunaan anggaran publik. Berdasarkan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), akuntabilitas keuangan berfungsi sebagai mekanisme pemantauan agen (pemerintah daerah) oleh prinsipal (masyarakat). Secara teoretis, tata kelola keuangan yang baik seharusnya mendukung efektivitas program pengurangan kemiskinan. Namun, terdapat pertanyaan kritis apakah akuntabilitas keuangan berbasis opini audit benar-benar berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan mengingat opini audit lebih banyak mencerminkan kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan efektivitas program pembangunan.

Penelitian ini mengisi beberapa celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, mayoritas penelitian menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat kemiskinan secara tidak langsung digunakan untuk memenuhi SDG 1. Kedua, tidak banyak penelitian yang mengevaluasi akuntansi manajemen sektor publik untuk menganalisis sejauh mana pencapaian SDG, meskipun efektivitas pengelolaan keuangan daerah relevan. Ketiga, sedikit penelitian yang menilai peran mediasi akuntabilitas keuangan terhadap hubungan antara kapasitas fiskal dan kemiskinan, terutama dari perspektif pascapandemi. Keempat, penggunaan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dalam model mediasi fiskal-kemiskinan di Indonesia masih jarang dalam kajian penelitian yang ada.

Selain keempat celah tersebut, telaah atas penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa temuan hubungan fiskal-kemiskinan belum sepenuhnya konsisten. Digdowiseiso (2022) menemukan bahwa desentralisasi fiskal baru efektif menurunkan kemiskinan jika disertai kualitas institusi yang memadai, sedangkan Siburian (2022) dan Manto (2026) melaporkan hubungan negatif yang kuat dan relatif seragam antara kapasitas fiskal dan kemiskinan tanpa mempertimbangkan peran tata kelola. El-Feky et al. (2023) bahkan menunjukkan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan sangat bergantung pada kualitas *governance* dan dapat menjadi tidak signifikan pada konteks tata kelola yang lemah. Pola yang sebanding juga ditemukan pada level belanja modal: Masduki et al. (2022) dan Tirtosuharto (2022) melaporkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, sementara Nurias et al. (2023) mencatat bahwa efektivitas belanja modal sangat bervariasi antarprovinsi bergantung pada kapasitas implementasi pemerintah daerah. Perbedaan arah dan kekuatan temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan fiskal-kemiskinan kemungkinan besar tidak bersifat langsung dan seragam, tetapi dimoderasi atau dimediasi oleh faktor tata kelola/akuntabilitas keuangan yang selama ini jarang dimasukkan secara eksplisit ke dalam model penelitian. Kondisi itu menjadi dasar rasional mengapa akuntabilitas keuangan layak diuji sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini: jika sebagian variasi hasil penelitian terdahulu disebabkan

oleh perbedaan kualitas tata kelola keuangan daerah yang belum dimodelkan secara eksplisit, maka memasukkan akuntabilitas keuangan sebagai jalur mediasi diharapkan dapat menjelaskan mekanisme di balik inkonsistensi tersebut sekaligus menjawab kesenjangan ketiga yang diidentifikasi di atas.

Kebaruan penelitian ini menempatkan tingkat kemiskinan sebagai indikator capaian SDG 1: semakin rendah tingkat kemiskinan semakin baik capaian SDG 1, mengintegrasikan perspektif akuntansi sektor publik dengan instrumen fiskal daerah dalam satu model, dan menggunakan data panel 34 provinsi periode 2020–2024 yang mencakup dinamika fiskal pascapandemi. Secara lebih spesifik, penelitian terdahulu umumnya menguji kapasitas fiskal dan kemiskinan sebagai hubungan bivariat tanpa menjelaskan mekanisme keuangan yang menjembatani keduanya (Digdowiseiso, 2022), belum banyak menempatkan akuntabilitas keuangan sebagai jalur mediasi eksplisit dalam model fiskal-kemiskinan (Sianturi & Dwicaksono, 2023), dan jarang menguji apakah pola *fiscal federalism* yang berlaku di negara-negara berkembang lain juga konsisten pada konteks desentralisasi fiskal Indonesia pascapandemi (El-Feky et al., 2023). Dengan mengisi ketiga celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan teoretis berupa pengujian empiris atas asumsi bahwa akuntabilitas keuangan secara otomatis menjadi mekanisme transmisi antara kapasitas fiskal, belanja modal, dan penurunan kemiskinan, alih-alih hanya mengasumsikannya secara normatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas fiskal dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan sebagai kontribusi terhadap capaian SDG 1 dan menguji apakah akuntabilitas keuangan memediasi pengaruh kapasitas fiskal dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan pada pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih berorientasi pada pengurangan kemiskinan.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

SDG 1 dan Pengentasan Kemiskinan Daerah

SDG 1 menekankan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya pada tahun 2030. Indonesia telah berkomitmen terhadap agenda global ini melalui berbagai instrumen kebijakan nasional (Sachs et al., 2023; United Nations, 2023). Dalam konteks pemerintah daerah, capaian SDG 1 dapat diamati melalui penurunan tingkat kemiskinan antarwilayah. Penelitian ini menggunakan tingkat kemiskinan sebagai indikator invers capaian SDG 1. Dengan semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin rendah capaian SDG 1. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin baik kontribusi daerah terhadap agenda SDG. Penggunaan indikator tersebut memberikan kejelasan konseptual yang lebih spesifik dibandingkan indeks pembangunan komposit (Masduki et al., 2022).

Landasan Teori

Teori *stewardship* (Donaldson & Davis, 1991) memposisikan manajer dalam konteks ini pemerintah daerah sebagai pengelola (*steward*) yang secara intrinsik termotivasi untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan kolektif. Berdasarkan teori ini, pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih kuat akan menggunakan kemandirian fiskalnya untuk mengoptimalkan program pembangunan dan pengentasan kemiskinan, tidak hanya memenuhi target administratif. Teori ini menjadi landasan hipotesis H-1 (kapasitas fiskal terhadap kemiskinan) dan H-2 (belanja modal terhadap kemiskinan).

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) menggambarkan hubungan prinsipal-agen: masyarakat sebagai prinsipal mendelegasikan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah sebagai agen. Dalam kerangka ini, akuntabilitas keuangan berfungsi sebagai mekanisme pemantauan dan pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi dan biaya keagenan. Teori ini menjadi landasan hipotesis H-3 (akuntabilitas terhadap kemiskinan), H-4 (kapasitas fiskal terhadap akuntabilitas), dan H-5 (belanja modal terhadap akuntabilitas).

Teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972) berargumentasi bahwa pemerintah daerah, karena memiliki informasi yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal, dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dibandingkan pemerintah pusat. Kapasitas fiskal yang kuat memberikan otonomi lebih besar kepada daerah untuk merancang program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, termasuk program pengentasan kemiskinan. Teori ini mendukung hipotesis H-1 dan H-4.

Konsep *value for money* (Moore, 1995) menekankan bahwa belanja publik tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari manfaat ekonomi, efisiensi, dan dampak sosial yang dihasilkan. Belanja modal yang diarahkan pada infrastruktur produktif berpotensi menghasilkan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan. Konsep ini menjadi dasar hipotesis H-2 dan memberikan argumen normatif mengapa belanja modal seharusnya berkontribusi pada capaian SDG 1.

Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemiskinan

Kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, yang diproksikan dengan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan, termasuk alokasi pada program pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi yang berdampak pada pengurangan kemiskinan (Siburian, 2022).

Berbeda dengan anggaran berbasis transfer yang terikat ketentuan pusat, PAD memberikan ruang kebijakan yang lebih luas untuk menyesuaikan program dengan karakteristik kemiskinan lokal. Dalam perspektif teori *stewardship* (Donaldson & Davis, 1991), kapasitas fiskal yang lebih kuat memperbesar kemampuan pemerintah daerah menjalankan peran sebagai pengelola yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Temuan Siburian (2022) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mendorong pengurangan kemiskinan di 34 provinsi Indonesia, sementara Manto (2026) menemukan bahwa provinsi

dengan kapasitas fiskal tinggi secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah.

H1: Kapasitas fiskal berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan.

Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan

Belanja modal merupakan alokasi anggaran untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Dalam konteks pembangunan daerah, belanja modal menghasilkan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, irigasi, dan fasilitas publik lainnya yang memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

Berdasarkan konsep *value for money* (Moore, 1995), belanja modal yang baik menghasilkan efek *multiplier* melalui peningkatan konektivitas, penurunan biaya transaksi, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses ekonomi. Masduki et al. (2022) menemukan bahwa kualitas belanja daerah, termasuk proporsi belanja modal, signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Tirtosuharto (2022) juga membuktikan efisiensi fiskal, termasuk alokasi belanja modal, berkontribusi pada pengurangan kemiskinan secara spasial.

H2: Belanja modal berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan.

Akuntabilitas Keuangan dan Tingkat Kemiskinan

Akuntabilitas keuangan merupakan mekanisme penting dalam tata kelola sektor publik. Berdasarkan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), akuntabilitas keuangan yang baik diharapkan meningkatkan transparansi, mengurangi penyimpangan, dan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan anggaran yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan, termasuk pengurangan kemiskinan.

H3: Akuntabilitas keuangan berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan.

Kapasitas Fiskal, Belanja Modal, dan Akuntabilitas Keuangan

Secara teoretis, kapasitas fiskal yang lebih tinggi meningkatkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan mendorong kebutuhan akuntabilitas yang lebih kuat. Daerah dengan PAD besar menghadapi tekanan yang lebih besar dari pemangku

kepentingan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan (Diansari et al., 2022). Demikian pula, belanja modal yang lebih besar membutuhkan tata kelola pengadaan dan pelaporan yang lebih baik karena berkaitan dengan risiko penyimpangan anggaran yang lebih tinggi (Sianturi & Dwicaksono, 2023).

H4: Kapasitas fiskal berpengaruh positif pada akuntabilitas keuangan.

H5: Belanja modal berpengaruh positif pada akuntabilitas keuangan.

Peran Mediasi Akuntabilitas Keuangan

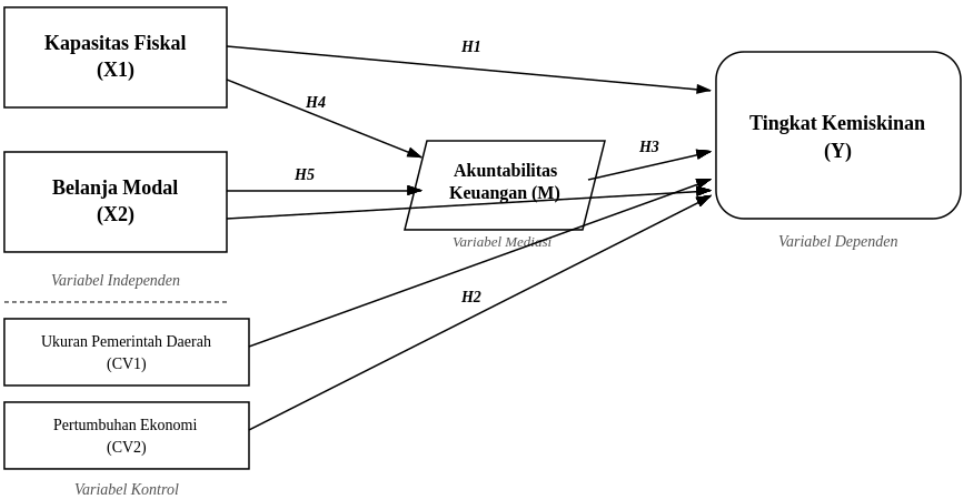
Jika akuntabilitas keuangan (H-3–H-5 didukung), akuntabilitas dapat menjadi mekanisme transmisi yang memperkuat dampak kapasitas fiskal dan belanja modal terhadap pengurangan kemiskinan. Artinya, kapasitas fiskal yang tinggi meningkatkan akuntabilitas, dan akuntabilitas yang baik memastikan pengelolaan anggaran lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan sehingga membentuk jalur mediasi tidak langsung. Mediasi ini sejalan dengan argumen bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan prasyarat efektivitas program pembangunan.

H6: Akuntabilitas keuangan memediasi pengaruh kapasitas fiskal terhadap tingkat kemiskinan.

H7: Akuntabilitas keuangan memediasi pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemiskinan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 1 menyajikan kerangka konseptual penelitian. Kapasitas fiskal (X-1) dan belanja modal (X-2) berperan sebagai variabel independen dengan pengaruh negatif langsung terhadap tingkat kemiskinan (Y). Akuntabilitas keuangan (M) berperan sebagai variabel mediasi. Ukuran pemerintah daerah (CV-1) dan pertumbuhan ekonomi (CV-2) dikendalikan sebagai variabel kontrol. Dalam kerangka SDG 1, tingkat kemiskinan berfungsi sebagai indikator invers: koefisien negatif pada jalur menuju Y diinterpretasikan sebagai kontribusi positif terhadap capaian SDG 1.



Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian

Tabel 1

Kerangka Konseptual Penelitian

Komponen	Variabel	Arah yang Diharapkan
Independen	Kapasitas Fiskal (X1)	Negatif terhadap tingkat kemiskinan
Independen	Belanja Modal (X2)	Negatif terhadap tingkat kemiskinan
Mediasi	Akuntabilitas Keuangan (M)	Negatif terhadap tingkat kemiskinan, memediasi X1/X2 → Y
Dependen	Tingkat Kemiskinan (Y)	Semakin rendah Y, semakin baik capaian SDGs *Goal* 1
Kontrol	Ukuran Pemda (CV1)	Dikendalikan terhadap Y
Kontrol	Pertumbuhan Ekonomi (CV2)	Dikendalikan terhadap Y

Sumber: Peneliti (2026)

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, yaitu menjelaskan hubungan kausalitas antarvariabel melalui pengujian hipotesis yang dibangun secara deduktif dari teori. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kapasitas fiskal dan belanja modal terhadap tingkat

kemiskinan, serta menilai peran mediasi akuntabilitas keuangan dalam model tersebut.

Populasi, Unit Analisis, dan Data

Unit analisis penelitian adalah pemerintah provinsi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data panel seimbang (*balanced panel data*) yang mencakup 34 provinsi selama periode 2020–2024, sehingga menghasilkan 170 observasi (N=170). Data bersumber dari laporan yang dirilis tiga lembaga resmi pemerintah: (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk data fiskal daerah; (2) Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi; (3) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI untuk data opini audit sebagai proksi akuntabilitas keuangan.

Pengukuran Variabel

Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan (Y) yang diukur menggunakan persentase penduduk miskin per provinsi berdasarkan garis kemiskinan BPS. Dalam penelitian ini, tingkat kemiskinan diperlakukan sebagai indikator invers capaian SDG 1: koefisien negatif pada jalur menuju Y menunjukkan kontribusi positif terhadap capaian SDG 1.

Variabel independen terdiri atas (1) kapasitas fiskal (X-1) yang diukur menggunakan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah—semakin tinggi rasio, semakin tinggi kemandirian fiskal; (2) belanja modal (X-2) yang diukur menggunakan proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah—mencerminkan orientasi investasi pemerintah daerah.

Variabel mediasi adalah akuntabilitas keuangan (M) yang diukur berdasarkan opini audit BPK dengan skala ordinal 1–5 (1=Tidak Menyatakan Pendapat/TMP, 2=Tidak Wajar/TW, 3=Wajar dengan Pengecualian/WDP, 4=Wajar dengan Pengecualian Minor, 5=Wajar Tanpa Pengecualian/WTP). Opini WTP mencerminkan kualitas pelaporan keuangan tertinggi (BPK RI, 2024).

Variabel kontrol terdiri atas (1) ukuran pemerintah daerah (CV-1) yang diukur menggunakan logaritma natural total pendapatan daerah; (2) pertumbuhan

ekonomi (CV-2) yang diukur menggunakan pertumbuhan PDRB (%) per tahun. Kedua variabel ini dikendalikan untuk mengisolasi pengaruh variabel utama.

Teknik Analisis: PLS-SEM

Analisis data dilakukan menggunakan *Partial Least Squares-Structural Equation Modelling* (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4.0. PLS-SEM dipilih karena (1) bersifat *distribution-free* sehingga tidak mensyaratkan data berdistribusi normal; (2) sesuai untuk model prediktif dengan konstruk indikator tunggal (*single-item construct*); (3) relevan untuk menguji baik hubungan langsung maupun tidak langsung antarvariabel.

Pemilihan PLS-SEM dibandingkan regresi data panel (*fixed/random effects*) didasarkan pada tiga pertimbangan metodologis. Pertama, regresi panel konvensional dirancang untuk menguji hubungan langsung antarvariabel *observed*, sedangkan penelitian ini menguji model struktural dengan jalur mediasi berjenjang (kapasitas fiskal dan belanja modal terhadap akuntabilitas, serta akuntabilitas terhadap kemiskinan) yang memerlukan estimasi simultan efek langsung, tidak langsung, dan total dalam satu model—sesuatu yang tidak dapat dilakukan secara *native* oleh regresi panel tanpa prosedur bertahap yang rentan bias *standard error*. Kedua, PLS-SEM menyediakan prosedur *bootstrap* nonparametrik untuk menguji signifikansi efek tidak langsung sekaligus VAF sebagai ukuran proporsi mediasi, yang lebih sesuai untuk desain penelitian ini dibandingkan uji Sobel atau kausalitas Granger pada data panel. Ketiga, karena tujuan penelitian bersifat prediktif-eksploratif pada model yang relatif baru (integrasi kapasitas fiskal, belanja modal, dan akuntabilitas keuangan dalam satu model SDG 1), PLS-SEM lebih tepat digunakan dibandingkan *covariance-based* SEM ataupun regresi panel yang berorientasi konfirmatori (Hair et al., 2019; Hair et al., 2024). Dengan demikian, pemilihan PLS-SEM bukan sekadar preferensi teknis, melainkan konsekuensi langsung dari struktur model mediasi yang diuji.

Pengujian signifikansi dilakukan menggunakan prosedur *Percentile Bootstrap* CI 95% dengan 5.000 subsampel, *two-tailed test* (α=0,05). Hipotesis dinyatakan signifikan apabila *confidence interval* (CI) 95% tidak mencakup nilai nol (Hair et al., 2022). Uji mediasi menggunakan *Variance Accounted For* (VAF):

VAF<20% = tidak ada mediasi; 20–80% = mediasi parsial; >80% = mediasi penuh.

Karena seluruh konstruk menggunakan indikator tunggal, evaluasi model pengukuran difokuskan pada justifikasi konseptual mengacu pada Bergkvist dan Rossiter (2007) serta Diamantopoulos et al. (2012) yang menunjukkan bahwa konstruk *single-item* memiliki *predictive validity* yang setara dengan konstruk *multi-item* untuk variabel yang dapat diobservasi secara langsung. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, matriks korelasi, evaluasi model pengukuran, evaluasi model struktural, pengujian hipotesis efek langsung, tidak langsung, dan total, serta analisis *posthoc* ukuran sampel minimum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif variabel penelitian. Tingkat kemiskinan (Y) memiliki rata-rata 10,217% dengan rentang 3,78% (DKI Jakarta, terendah) hingga 26,86% (Papua, tertinggi), mencerminkan disparitas kemiskinan yang sangat tinggi antarprovinsi. Standar deviasi sebesar 5,116 mengindikasikan heterogenitas data yang justru meningkatkan daya prediksi model. Kapasitas fiskal (X-1) rata-rata 0,409, artinya 40,9% total pendapatan provinsi bersumber dari PAD. Belanja modal (X-2) rata-rata 12,25% dari total belanja. Akuntabilitas keuangan (M) memiliki rata-rata 4,965, mendekati nilai maksimum 5 (WTP), mengindikasikan konvergensi opini BPK yang tinggi di seluruh provinsi.

Tabel 2

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Satuan	N	Min	Maks	Rerata	Median	StDev	Skewness	Kurtosis
Kapasitas Fiskal (X1)	Rasio PAD	170	0,057	0,736	0,409	0,392	0,160	0,120	−0,672
Belanja Modal (X2)	% thd Belanja	170	10,215	14,560	12,253	12,186	0,821	0,147	0,142
Akuntabilitas (M)	Opini BPK (1–5)	170	4,000	5,000	4,965	5,000	0,185	−5,082	24,108
Tingkat	% Pddk	17	3,780	26,86	10,21	8,665	5,116	1,150	1,098

Variabel	Satuan	N	Min	Maks	Rerata	Median	StDev	Skewness	Kurtosis
Kemiskinan (Y)	Miskin	0		0	7				
Ukuran Pemda (CV1)	Ln Total Pdptn	170	28,245	31,921	29,561	29,433	0,830	0,771	0,316
Pertumb. Ekonomi (CV2)	% PDRB/tahun	170	−9,340	22,940	3,955	4,495	4,186	1,319	5,857

Sumber: Olah data SmartPLS 4.0 (2026). Kurtosis = excess kurtosis. N = 170 observasi (34 provinsi × 5 tahun, 2020–2024).

Matriks Korelasi

Tabel 3 menyajikan matriks korelasi Pearson antarvariabel. Korelasi tertinggi ditemukan antara kapasitas fiskal (X-1) dan ukuran pemda (CV-1) dengan r=0,663 sehingga wajar secara substantif karena daerah dengan pendapatan besar cenderung memiliki PAD lebih tinggi. Kapasitas fiskal juga berkorelasi kuat negatif dengan tingkat kemiskinan (r=−0,604), memberikan gambaran awal hubungan yang akan diuji secara struktural. Semua korelasi di bawah 0,9, sehingga tidak mengindikasikan masalah multikolinearitas.

Tabel 3

Matriks Korelasi Antarvariabel (Nilai Terstandarisasi)

	X1	X2	M	Y	CV1	CV2
Kap. Fiskal (X1)	1,000	−0,452*	0,128	−0,604*	0,663*	−0,063
Belanja Modal (X2)	−0,452*	1,000	−0,129	0,001	−0,263*	0,188*
Akuntabilitas (M)	0,128	−0,129	1,000	−0,094	0,026	−0,338*
Kemiskinan (Y)	−0,604*	0,001	−0,094	1,000	−0,154*	0,072
Ukuran Pemda (CV1)	0,663*	−0,263*	0,026	−0,154*	1,000	−0,084
Pertumb. Eko. (CV2)	−0,063	0,188*	−0,338*	0,072	−0,084	1,000

*Catatan: * korelasi relatif kuat (|r| > 0,200)*
Sumber: SmartPLS 4.0 (2026).

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Karena seluruh konstruk dalam penelitian ini dioperasionalisasikan sebagai konstruk *single-item*, evaluasi model pengukuran mengikuti prosedur khusus yang direkomendasikan. *Outer loading* seluruh konstruk bernilai 1,0, sehingga kondisi

normal untuk konstruk *single-item* karena tidak ada varians pengukuran yang dapat dipisahkan dari varians konstruk. VIF *outer model* seluruh indikator bernilai tepat 1,000, mengonfirmasi tidak adanya masalah multikolinearitas pada level model pengukuran.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4 menyajikan nilai R^2 dan R^2 *adjusted.* Nilai R^2=0,591 untuk tingkat kemiskinan. Hal itu mengindikasikan bahwa model menjelaskan 59,1% varians kemiskinan antarprovinsi—tergolong moderat–baik untuk data panel lintas provinsi. *Bootstrap* CI untuk R^2 Kemiskinan adalah [0,508; 0,693], tidak mencakup nilai di bawah 0,50. R^2 Akuntabilitas sebesar 0,023 sangat rendah, yang mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal dan belanja modal hanya menjelaskan 2,3% varians opini BPK.

Tabel 4

Koefisien Determinasi (R^2) dan Bootstrap Confidence Interval

Konstruk	R^2	R^2 Adjusted	Bootstrap CI 95%	Interpretasi
Akuntabilitas (M)	0,023	0,011	CI [0,002; 0,084]	Rendah
Tingkat Kemiskinan (Y)	0,591	0,578	CI [0,508; 0,693]	Moderat–Baik

Catatan: CI = Confidence Interval Bootstrap Percentile 95% dengan 5.000 subsampel.
Sumber: SmartPLS 4.0 (2026).

Ukuran Efek f^2

Tabel 5 menyajikan ukuran efek f^2 Cohen. Kapasitas fiskal memiliki f^2=1,354 terhadap kemiskinan—efek sangat besar dan merupakan prediktor paling dominan dalam model. Ukuran pemda (f^2=0,304) dan belanja modal (f^2=0,279) tergolong efek medium-besar. Akuntabilitas terhadap kemiskinan memiliki f^2=0,001 yang dapat diabaikan (*negligible*). Hal itu mengonfirmasi ketiadaan pengaruh substantif akuntabilitas keuangan berbasis opini BPK terhadap kemiskinan.

Tabel 5

Ukuran Efek f² (Effect Size Cohen)

Jalur	f²	Kategori (Cohen)	Interpretasi
Akuntabilitas → Kemiskinan (H3)	0,001	Negligible (< 0,020)	Sangat kecil
Belanja Modal → Akuntabilitas (H5)	0,006	Negligible (< 0,020)	Sangat kecil
Belanja Modal → Kemiskinan (H2)	0,279	Medium (0,150–0,350)	Sedang
Kapasitas Fiskal → Akuntabilitas (H4)	0,006	Negligible (< 0,020)	Sangat kecil
Kapasitas Fiskal → Kemiskinan (H1)	1,354	Besar (> 0,350)	Sangat besar
Pertumbuhan Ekonomi → Kemiskinan (CV)	0,032	Kecil (0,020–0,150)	Kecil
Ukuran Pemda → Kemiskinan (CV)	0,304	Besar (> 0,350) ≈	Besar

Sumber: SmartPLS 4.0 (2026). Kriteria f²: < 0,020 = negligible; 0,020–0,150 = kecil; 0,150–0,350 = medium; > 0,350 = besar (Cohen).

VIF *Inner Model*

Tabel 6 menyajikan VIF *inner model*. Semua nilai VIF di bawah ambang batas 3,3 yang direkomendasikan Hair et al. (2022), dengan nilai tertinggi 2,140 untuk jalur kapasitas fiskal terhadap kemiskinan. Tidak ada masalah multikolinearitas yang dapat mengganggu estimasi koefisien jalur.

Tabel 6

Variance Inflation Factor (VIF) Inner Model

Jalur (Inner Model)	VIF	Evaluasi
Akuntabilitas → Kemiskinan	1,156	< 3,3
Belanja Modal → Akuntabilitas	1,257	< 3,3
Belanja Modal → Kemiskinan	1,304	< 3,3
Kapasitas Fiskal → Akuntabilitas	1,257	< 3,3
Kapasitas Fiskal → Kemiskinan	2,140	< 3,3
Pertumbuhan Ekonomi → Kemiskinan	1,171	< 3,3
Ukuran Pemda → Kemiskinan	1,816	< 3,3

Sumber: SmartPLS 4.0 (2026). Threshold: VIF < 3,3 (Hair et al., 2022).

Kecocokan Model (Model Fit)

Tabel 7 menyajikan indikator kecocokan model. SRMR=0,071 memenuhi kriteria *good fit* (< 0,080), dan NFI=0,935 termasuk *excellent* (> 0,900). BIC untuk

konstruk kemiskinan=−121,999 (negatif) mengindikasikan model *fit* yang sangat baik.

Tabel 7

Indikator Kecocokan Model (Model Fit)

Indikator	Model Saturasi	Model Estimasi	Ambang Batas	Evaluasi
SRMR	≈ 0	0,071	< 0,080 = Good fit	Good Fit
d_ULS	≈ 0	0,107	Lebih kecil = lebih baik	Acceptable
d_G	≈ 0	0,024	Lebih kecil = lebih baik	Good
Chi-square	≈ 0	20,659	Lebih kecil = lebih baik	Good
NFI	1,000	0,935	> 0,900 = Excellent	Excellent
BIC – Akuntabilitas	—	10,518	Lebih kecil = lebih baik	—
BIC – Kemiskinan (Y)	—	−121,999	Negatif = fit sangat baik	Sangat Baik

Sumber: SmartPLS 4.0 (2026). SRMR threshold < 0,08 (good) atau < 0,10 (acceptable). NFI threshold > 0,90.

Pengujian Hipotesis Koefisien Jalur (*Direct Effects*)

Karena Y merupakan indikator invers SDG 1, dengan semakin tinggi kemiskinan maka semakin buruk capaian SDG 1, koefisien negatif pada jalur menuju Y berarti variabel tersebut menurunkan kemiskinan yang secara substantif mendukung capaian SDG 1. Tabel 8 menyajikan hasil pengujian hipotesis berdasarkan dua jenis CI *Bootstrap: Percentile dan Bias-Corrected* (BC).

Tabel 8

Hasil Pengujian Koefisien Jalur: Efek Langsung (N=170; Bootstrap 5.000 Subsampel; CI 95%)

H	Jalur	β	CI 95% Percentile	CI 95% BC	f^2	Status CI	Keputusan
H1	Kap. Fiskal → Kemiskinan	−1,089	[−1,209; −0,963]	[−1,221; −0,975]	1,354	Tidak ≠ 0	Diterima
H2	Belanja Modal → Kemiskinan	−0,386	[−0,495; −0,285]	[−0,487; −0,276]	0,279	Tidak ≠ 0	Diterima
H3	Akuntabilitas → Kemiskinan	0,025	[−0,147; 0,198]	[−0,151; 0,194]	0,001	Melewati 0	Ditolak
H4	Kap. Fiskal → Akuntabilitas	0,087	[−0,077; 0,225]	[−0,081; 0,220]	0,006	Melewati 0	Ditolak

H	Jalur	β	CI 95% Percentile	CI 95% BC	f²	Status CI	Keputusan
H5	Belanja Modal → Akuntabilitas	−0,089	[−0,184; 0,018]	[−0,178; 0,028]	0,006	Melewati 0	Ditolak
—	Ukuran Pemda → Kemiskinan (CV)	0,476	[0,338; 0,595]	[0,356; 0,616]	0,304	Tidak ≠ 0	Signifikan
—	Pertumb. Eko. → Kemiskinan (CV)	0,124	[0,012; 0,251]*	[−0,002; 0,238]†	0,032	Borderline	Sig.*

*Keterangan: β = koefisien jalur terstandarisasi; CI = Confidence Interval Bootstrap; f² = ukuran efek Cohen. * Signifikan pada Percentile CI. † Borderline pada BC CI (LL sedikit melewati nol)*

Sumber: SmartPLS 4.0 (2026).

Pengujian Mediasi: Efek Tidak Langsung

Tabel 9 menyajikan efek tidak langsung untuk pengujian H-6 dan H-7. Kedua efek tidak langsung sangat kecil secara substantif dan CI mencakup nilai nol. VAF untuk H-7 hanya 0,57% dan H-6 bahkan negatif (−0,20%), menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan sama sekali tidak berkontribusi sebagai mekanisme transmisi antara variabel fiskal dan kemiskinan.

Tabel 9

Hasil Pengujian Efek Tidak Langsung dan Mediasi

H	Jalur Tidak Langsung	β	CI 95% Percentile	CI 95% BC	VAF	Status CI	Mediasi
H6	KF → Akuntabilitas → Kemiskinan	0,002	[−0,021; 0,026]	[−0,014; 0,035]	−0,20%	Melewati 0	Tidak Memediasi
H7	BM → Akuntabilitas → Kemiskinan	−0,002	[−0,024; 0,015]	[−0,028; 0,013]	0,57%	Melewati 0	Tidak Memediasi

Keterangan: VAF = Indirect Effect / Total Effect × 100%. VAF < 20% = tidak ada mediasi; 20–80% = parsial; > 80% = penuh (Hair et al., 2022). H6 dan H7 ditolak.
Sumber: SmartPLS 4.0 (2026).

Efek Total

Tabel 10 menyajikan efek total yang mencerminkan besaran pengaruh keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 10

Total Effects beserta Confidence Interval Bootstrap

Jalur	β Total	CI 95% Percentile	CI 95% Bias-Corrected
Kapasitas Fiskal → Kemiskinan	−1,087	[−1,202; −0,963]	[−1,216; −0,979]
Belanja Modal → Kemiskinan	−0,388	[−0,501; −0,285]	[−0,492; −0,276]
Akuntabilitas → Kemiskinan	0,025	[−0,147; 0,198]	[−0,151; 0,194]
Kapasitas Fiskal → Akuntabilitas	0,087	[−0,077; 0,225]	[−0,081; 0,220]
Belanja Modal → Akuntabilitas	−0,089	[−0,184; 0,018]	[−0,178; 0,028]
Pertumbuhan Ekonomi → Kemiskinan	0,124	[0,012; 0,251]	[−0,002; 0,238]
Ukuran Pemda → Kemiskinan	0,476	[0,338; 0,595]	[0,356; 0,616]

Sumber: SmartPLS 4.0 (2026). Nilai total effect = direct effect + indirect effect. 5.000 subsampel bootstrap.

Analisis *Posthoc* Ukuran Sampel Minimum

Tabel 11 menyajikan analisis *posthoc* yang mengonfirmasi kecukupan sampel N=170. Untuk seluruh jalur signifikan, sampel aktual jauh melampaui minimum yang dibutuhkan sehingga mengonfirmasi kekuatan statistik yang sangat tinggi (> 99%) untuk seluruh jalur signifikan dalam model.

Tabel 11

Analisis Posthoc Minimum Ukuran Sampel

Jalur	β	Min. N (α=5%, power=80%)	Min. N (α=5%, power=90%)
Akuntabilitas → Kemiskinan	0,025	10.017	13.874
Belanja Modal → Akuntabilitas	−0,089	776	1.075
Belanja Modal → Kemiskinan	−0,386	42	58
Kapasitas Fiskal → Akuntabilitas	0,087	814	1.128
Kapasitas Fiskal → Kemiskinan	−1,089	6	8
Pertumbuhan Ekonomi → Kemiskinan	0,124	400	553
Ukuran Pemda → Kemiskinan	0,476	28	38

Sumber: SmartPLS 4.0 (2026). Sampel aktual N=170. Seluruh jalur signifikan memiliki sampel jauh melampaui minimum, sehingga mengonfirmasi kecukupan sampel.

Pembahasan

Kapasitas Fiskal Menurunkan Kemiskinan dan Mendukung SDG 1

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kapasitas fiskal berpengaruh negatif signifikan pada tingkat kemiskinan sehingga menjadi determinan paling dominan dalam model. Temuan ini mendukung H-1 dan bermakna bahwa setiap peningkatan kemandirian fiskal daerah yang diukur dari proporsi PAD terhadap total pendapatan secara signifikan berkontribusi pada penurunan kemiskinan, yang secara langsung mendorong capaian SDG 1.

Temuan ini konsisten dengan *fiscal federalism theory* (Oates, 1972), yaitu daerah dengan kemandirian fiskal lebih tinggi mampu merancang program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, termasuk program prokemiskinan tanpa terikat ketentuan transfer pusat. Siburian (2022) membuktikan secara empiris bahwa desentralisasi fiskal di 33 provinsi Indonesia mendorong pengurangan kemiskinan. Tirtosuharto (2022) menunjukkan hubungan spasial antara efisiensi fiskal dan penurunan kemiskinan di Indonesia. Manto (2026) menemukan bahwa provinsi berkapasitas fiskal tinggi secara konsisten memiliki kemiskinan lebih rendah. Sementara itu, Masduki et al. (2022) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa kualitas belanja daerah yang didukung kapasitas fiskal kuat signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

Dalam perspektif teori *stewardship* (Donaldson & Davis, 1991), pemerintah daerah dengan kemandirian fiskal tinggi memiliki kapasitas lebih besar untuk menjalankan peran sebagai pengelola (*steward*) yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, temuan ini juga perlu dibaca secara kritis: kapasitas fiskal yang tinggi tidak otomatis menurunkan kemiskinan apabila tidak diikuti prioritas belanja yang tepat. Dalam kerangka SDG 1, penguatan kapasitas fiskal harus diiringi kebijakan anggaran yang berbasis *outcome*, bukan sekadar peningkatan pendapatan daerah.

Besaran pengaruh kapasitas fiskal (f^2=1,354) yang jauh melampaui ambang batas efek besar Cohen (>0,350) perlu dijelaskan lebih rinci, tidak hanya dinyatakan sebagai temuan dominan. Kekuatan pengaruh ini konsisten dengan karakteristik data panel pascapandemi periode 2020–2024: pada tahun-tahun awal

periode observasi, sebagian besar provinsi mengalami kontraksi pendapatan daerah dan lonjakan kemiskinan akibat pandemi covid-19, sementara pemulihan pada 2022–2024 berlangsung tidak merata antarprovinsi. Provinsi dengan kapasitas fiskal (rasio PAD) yang lebih tinggi memiliki bantalan fiskal (*fiscal buffer*) yang lebih besar untuk mempertahankan belanja perlindungan sosial dan program pemulihan ekonomi selama dan setelah masa pandemi, sementara provinsi dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat lebih rentan terhadap keterlambatan pencairan dan keterbatasan fleksibilitas anggaran. Dinamika pemulihan pascapandemi yang bersifat divergen inilah yang kemungkinan memperbesar variansi kemiskinan antarprovinsi yang dapat dijelaskan oleh kapasitas fiskal dibandingkan periode nonkrisis sehingga turut menjelaskan mengapa hubungan ini tampil jauh lebih kuat dibandingkan temuan pada penelitian-penelitian sebelum pandemi.

Belanja Modal Berkontribusi pada Pengurangan Kemiskinan

Belanja modal berpengaruh negatif signifikan pada tingkat kemiskinan sehingga mendukung H-2 dan menegaskan bahwa belanja modal merupakan instrumen fiskal yang relevan untuk mendukung capaian SDG 1. Semakin besar proporsi belanja modal dalam struktur belanja daerah, semakin rendah tingkat kemiskinan.

Mekanisme ini konsisten dengan konsep *value for money* (Moore, 1995): belanja modal menghasilkan aset publik, yaitu jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, irigasi, pasar, yang meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Ketika akses meningkat, hambatan struktural penyebab kemiskinan dapat dikurangi. Nurias et al. (2023) menemukan pengaruh negatif belanja modal terhadap kemiskinan provinsi menggunakan pendekatan dynamic panel data. Gai et al. (2026) memberikan bukti serupa di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Triwulandari (2023) juga menemukan hubungan negatif signifikan belanja modal terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Temuan ini diinterpretasikan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan proporsi dan kualitas belanja modal, terutama yang diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan SDG 1, yaitu pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, transportasi, dan infrastruktur ekonomi lokal. Belanja modal yang tidak

diarahkan pada sektor-sektor tersebut dapat membatasi dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan.

Akuntabilitas Keuangan Berbasis Opini BPK Tidak Berpengaruh Langsung

Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan sehingga H-3 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa opini audit BPK sebagai proksi akuntabilitas keuangan belum mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antarprovinsi.

Secara konseptual, opini BPK terutama mengukur kewajaran penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap SAP, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengendalian internal (BPK RI, 2024). Opini tersebut tidak secara langsung mengukur efektivitas program pembangunan atau keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan kemiskinan. Dengan demikian, ada perbedaan mendasar antara akuntabilitas administratif (kewajaran pelaporan keuangan) dan akuntabilitas pembangunan (dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat). Sementara Sianturi & Dwicaksono (2023) mencatat bahwa akuntabilitas administratif belum secara otomatis berdampak pada kinerja pembangunan daerah. Diansari et al. (2022) juga menunjukkan bahwa opini BPK lebih banyak ditentukan oleh kapasitas teknis aparatur daripada oleh besaran fiskal.

Di sisi lain, konvergensi nasional opini WTP (mayoritas pemerintah provinsi telah memperoleh opini WTP pada 2024; BPK RI, 2024) secara statistik mengurangi variansi antardaerah pada variabel akuntabilitas, sehingga opini BPK kehilangan daya prediksi terhadap kemiskinan. Kondisi ini tidak berarti akuntabilitas keuangan tidak penting, tetapi untuk mendukung SDG 1, akuntabilitas perlu diperluas dari orientasi pelaporan menuju akuntabilitas berbasis kinerja dan *outcome* pembangunan.

Penting untuk ditegaskan bahwa penolakan H-3–H-7 dalam penelitian ini kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan proksi akuntabilitas yang digunakan, bukan akuntabilitas keuangan yang secara substantif tidak berperan dalam pengentasan kemiskinan. Variabel akuntabilitas yang diukur melalui skor ordinal opini audit BPK (1–5) memiliki rata-rata 4,965 dengan standar deviasi

hanya 0,185, sehingga hampir seluruh provinsi terkonsentrasi pada opini WTP. Kondisi ini menghasilkan *restriction of range* yang secara statistik menekan variansi yang dapat dijelaskan dan menurunkan kekuatan prediksi (*power*) jalur yang melibatkan akuntabilitas, terlepas dari benar tidaknya hubungan substantif yang mendasarinya. Dengan kata lain, ketiadaan pengaruh signifikan dalam penelitian ini lebih tepat dibaca sebagai keterbatasan pengukuran (*measurement artifact*) dibandingkan bukti definitif bahwa akuntabilitas tidak relevan bagi capaian SDG 1. Aspek ini perlu diperdalam pada penelitian mendatang, misalnya dengan proksi akuntabilitas berbasis kinerja yang memiliki variabilitas lebih tinggi, seperti skor SAKIP atau Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah, sebagaimana diuraikan pada bagian keterbatasan dan saran penelitian.

Kapasitas Fiskal Tidak Menentukan Kualitas Opini BPK

Kapasitas fiskal dan belanja tidak berpengaruh signifikan pada akuntabilitas keuangan. R^2 Akuntabilitas yang sangat rendah (0,023) mengonfirmasi bahwa variabel fiskal hanya menjelaskan 2,3% varians opini BPK. Temuan ini selaras dengan argumen bahwa kualitas opini BPK lebih ditentukan oleh kapasitas teknis aparatur, efektivitas SPIP, penerapan SAP berbasis akrual, dan komitmen pimpinan daerah, bukan oleh besaran fiskal. Daerah dengan kapasitas fiskal terbatas tetap dapat memperoleh opini WTP apabila memiliki sistem akuntansi dan pengendalian internal yang memadai (Diansari et al., 2022).

Tidak Ada Mediasi Akuntabilitas

Efek tidak langsung melalui akuntabilitas keuangan sangat kecil sehingga tidak ada hubungan mediasi. Penolakan H-6–H-7 merupakan dampak ditolaknya H-3–H-5. Tanpa pengaruh signifikan kapasitas fiskal dan belanja modal terhadap akuntabilitas (H-4–H-5), dan tanpa pengaruh akuntabilitas terhadap kemiskinan (H-3), hubungan mediasi tidak dapat terbentuk. Secara substantif, temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme kapasitas fiskal dan belanja modal terhadap kemiskinan bekerja secara langsung melalui pembiayaan program pembangunan dan penyediaan infrastruktur publik, bukan melalui akuntabilitas formal berbasis opini audit.

Tiga penjelasan berikut saling melengkapi dan dapat menjelaskan mengapa akuntabilitas keuangan gagal menjadi mediator dalam model ini. Pertama, sebagaimana diuraikan pada subbagian 4.9.3, opini BPK yang hampir seragam (WTP) di seluruh provinsi menghasilkan *restriction of range* yang menekan variansi konstruk akuntabilitas sehingga jalur mediasi kehilangan daya statistik untuk terdeteksi meskipun secara substantif mungkin tetap relevan.

Kedua, opini audit pada dasarnya adalah ukuran akuntabilitas administratif atas kewajaran laporan keuangan, bukan ukuran akuntabilitas kinerja atas efektivitas program; dengan demikian, jalur kapasitas fiskal/belanja modal → akuntabilitas → kemiskinan secara konseptual mengasumsikan bahwa kepatuhan pelaporan otomatis diterjemahkan menjadi keberhasilan program pengentasan kemiskinan, sebuah asumsi yang tidak selalu berlaku karena keduanya berada pada tahap siklus anggaran yang berbeda (opini audit dinilai pascapelaksanaan anggaran, sementara dampak kemiskinan bergantung pada desain dan implementasi program sejak awal). Ketiga, dalam konteks pascapandemi, sebagian belanja daerah dialihkan secara cepat untuk penanganan krisis (*refocusing* anggaran), yang berpotensi melonggarkan hubungan antara kualitas pengendalian internal formal dan hasil pembangunan riil di lapangan. Ketiga penjelasan ini menegaskan bahwa kegagalan akuntabilitas sebagai mediator mencerminkan keterbatasan desain proksi dan konteks pascapandemi dibandingkan bukti bahwa tata kelola keuangan tidak relevan bagi pengentasan kemiskinan.

Variabel Kontrol: Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan pada kemiskinan, artinya provinsi dengan anggaran lebih besar justru cenderung memiliki kemiskinan lebih tinggi. Ini merupakan paradoks struktural yang dapat dijelaskan oleh karakteristik provinsi besar di Indonesia: Papua, Papua Barat, dan beberapa provinsi Kalimantan memiliki anggaran besar (karena DAK dan DBH sumber daya alam), tetapi juga memiliki tantangan geografis, infrastruktur yang belum merata, dan disparitas pembangunan yang tinggi (Nurias et al., 2023).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil *borderline*, yakni signifikan pada *percentile* CI, tetapi CI *bias-corrected* [−0,002; 0,238] sedikit melewati nol. Temuan ini perlu diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu langsung menurunkan kemiskinan apabila tidak inklusif. Dalam konteks SDG 1, pertumbuhan harus menciptakan kesempatan kerja bagi kelompok miskin, meningkatkan pendapatan, dan memperluas akses terhadap layanan dasar (Sachs et al., 2023).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kapasitas fiskal dan belanja modal berpengaruh negatif signifikan pada tingkat kemiskinan sebagai indikator invers capaian SDG 1 pada 34 provinsi Indonesia periode 2020–2024. Kemandirian fiskal daerah merupakan determinan paling dominan dalam model, yang menegaskan posisinya sebagai instrumen strategis percepatan capaian SDG 1. Belanja modal, melalui mekanisme pembangunan aset publik dan perluasan akses masyarakat miskin, juga berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Sebaliknya, akuntabilitas keuangan berbasis opini BPK tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan dan tidak memediasi hubungan fiskal terhadap kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan belum secara otomatis bertransformasi menjadi akuntabilitas pembangunan. Opini WTP yang sudah dicapai mayoritas provinsi tidak serta merta tercermin dalam penurunan kemiskinan karena keduanya mengukur dimensi yang berbeda dari kinerja pemerintah daerah. Model memiliki kemampuan prediksi yang baik dengan kualitas model fit yang sesuai dan analisis *posthoc* mengonfirmasi kecukupan sampel.

Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi teoretis. *Pertama*, hasil penelitian mendukung teori *stewardship* dalam konteks akuntansi sektor publik, yang

menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan peran sebagai pengelola sumber daya (*resources stewards*) untuk menangani kemiskinan, tetapi juga memperluas teori *stewardship* dengan memperluas penerapannya dari konteks organisasi ke tingkat pemerintah daerah. *Kedua*, penelitian ini memberikan kontribusi kritis terhadap teori agensi dengan menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan berbasis opini audit belum efektif sebagai mekanisme pemantauan yang berdampak pada pengurangan kemiskinan, sehingga memperluas perdebatan tentang keterbatasan akuntabilitas administratif dalam menghasilkan akuntabilitas pembangunan.

Ketiga, fiscal federalism theory (Oates, 1972) terkonfirmasi secara empiris melalui bukti bahwa kapasitas fiskal daerah merupakan proksi utama keberhasilan desentralisasi dalam menurunkan kemiskinan di tingkat provinsi. *Keempat,* konsep *value for money* (Moore, 1995) terbukti relevan secara empiris karena belanja modal sebagai representasi investasi publik menghasilkan manfaat nyata berupa pengurangan kemiskinan, yang mendukung argumen bahwa *public value* dapat diukur dari capaian SDGs. *Kelima*, secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa PLS-SEM dengan konstruk indikator tunggal dapat diterapkan secara valid pada data panel pemerintah daerah untuk menguji model mediasi sehingga memperkaya pilihan metode penelitian dalam akuntansi sektor publik.

Implikasi Kebijakan

Bagi pemerintah daerah, perlu memperkuat kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui perluasan basis pajak daerah, meningkatkan retribusi, serta mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan tetap memprioritaskan keadilan sosial tanpa membebani kelompok masyarakat miskin. Selain itu, porsi belanja modal perlu ditingkatkan, terutama yang diarahkan untuk infrastruktur dan barang publik yang secara langsung berkorelasi dengan SDG 1. Pemerintah daerah juga perlu memiliki sistem akuntabilitas yang didasarkan pada capaian (*outcome*) untuk pencapaian indikator SDGs daerah dan efektivitas belanja dalam penanggulangan kemiskinan.

Adapun untuk Kementerian Keuangan/DJPK, kebijakan pemerataan fiskal antarpemerintah daerah dapat dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan kapasitas fiskal secara utuh. Rancangan transfer fiskal harus sedemikian rupa sehingga memberikan insentif kepada daerah yang mencapai kemandirian fiskal yang lebih besar disertai pengurangan kemiskinan.

Sementara itu, untuk BPK RI dan Bappenas, penilaian keuangan daerah dapat diarahkan tidak hanya pada opini audit, tetapi juga pada luaran pembangunan. Pendekatan baru ini akan melengkapi audit keuangan BPK dengan audit kinerja berbasis SDGs untuk menghasilkan pandangan yang menyeluruh mengenai kontribusi fiskal daerah dalam pencapaian SDG 1.

Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian ini dilakukan pada tahun 2026, tetapi karena keterbatasan data yang dapat diakses, populasi mengambil periode 2020–2024. *Kedua,* proksi akuntabilitas keuangan yang digunakan, yaitu opini audit BPK lebih mencerminkan kewajaran pelaporan keuangan daripada efektivitas program. *Ketiga*, unit analisis menggunakan data agregat tingkat provinsi sehingga heterogenitas di tingkat kabupaten/kota belum tertangkap. *Keempat*, tingkat kemiskinan pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor selain kapasitas fiskal dan belanja modal, seperti tingkat pengangguran, capaian pendidikan, ketimpangan pendapatan (indeks GINI), IPM, dan investasi swasta, sementara model penelitian ini hanya mengendalikan dua variabel kontrol (ukuran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi) sehingga berpotensi menyisakan variabel pengganggu (*omitted variable*) yang belum terakomodasi dalam model.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. *Pertama,* disarankan menggunakan indikator akuntabilitas berbasis *outcome* (skor SAKIP atau Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah) sehingga proksi akuntabilitas yang digunakan lebih relevan dengan pencapaian SDG 1. *Kedua,* perlu memisahkan tingkat analisis menjadi level kabupaten/kota agar

diperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai keterkaitan antara langkah-langkah fiskal dan kemiskinan. *Ketiga,* penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel kontrol lain yang relevan secara teoretis, seperti tingkat pengangguran, indeks GINI, IPM, atau realisasi investasi, agar model dapat mengisolasi pengaruh kapasitas fiskal dan belanja modal secara lebih presisi. *Terakhir,* periode data dapat dilanjutkan ke periode pascapandemi (2026–2030) untuk memantau kemajuan dalam pencapaian SDG 1 menuju target terpenuhinya pada tahun 2030.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Tinjauan sistematis audit sektor publik di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 10*(1), 33–54.

Badan Pusat Statistik. (2024). Profil kemiskinan di Indonesia September 2023. *Berita Resmi Statistik* No. 07/01/Th. XXVII.

Bergkvist, L., & Rossiter, J. R. (2007). The predictive validity of multiple-item versus single-item measures of attitude objects. *Journal of Marketing Research, 44*(2), 175–184. https://doi.org/10.1509/jmkr.44.2.175

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Diamantopoulos, A., Sarstedt, M., Fuchs, C., Wilczynski, P., & Kaiser, S. (2012). Guidelines for choosing between multi-item and single-item scales for construct measurement: A predictive validity perspective. *Journal of the Academy of Marketing Science, 40*(3), 434–449. https://doi.org/10.1007/s11747-011-0300-3

Diansari, R. E., Wulandari, A., & Budiarto, D. S. (2022). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pemberian opini BPK di Pulau Jawa. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 5*(1), 25–33. https://doi.org/10.36815/prive.v5i1.1797

Digdowiseiso, K. (2022). Are fiscal decentralization and institutional quality poverty abating? Empirical evidence from developing countries. *Cogent Economics & Finance, 10*(1), 2095769. https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2095769

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Data APBD realisasi per provinsi 2020–2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or teori agensi: CEO governance and shareholder return. *Australian Journal of Management, 16*(1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103

El-Feky, M., Abdel-Kader, N., & Metwally, A. (2023). The theoretical impact of fiscal decentralisation on national income inequality: Does quality of governance matter? *International Journal of Economics and Financial Issues, 13*(6), 1–10. https://doi.org/10.32479/ijefi.15118

Gai, A., Apriyanto, G. A., & Burhan, M. (2026). The effect of local revenue, capital expenditure on poverty rate in East Nusa Tenggara. *International Journal of Innovative Science and Engineering (IIJSE), 9*(1), 877–892. https://doi.org/10.31538/iijse.v9i1.7756

Hair, J. F., Henseler, J., Dijkstra, T. K., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.

Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2024). *Advanced issues in partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Sage Publications.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Manto, M. (2026). Analisis tipologi daerah berdasarkan kapasitas fiskal dan tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan, 4*(1), 1–14.

Masduki, U., Rindayati, W., & Mulatsih, S. (2022). Quality of regional spending and poverty alleviation in Indonesia. *Journal of Asian Economics, 82,* 101515. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101515

Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government.* Harvard University Press.

Nurias, N., Johari, S. M., Muljarijadi, B., & Wardhana, A. (2023). Reducing provincial poverty rate in Indonesia: A dynamic panel data approach. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 24*(2), 297–315. https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.18618

Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J.-M. (2022). SmartPLS 4 [Computer software]. SmartPLS GmbH. https://www.smartpls.com

Sachs, J. D., Lafortune, G., Kroll, C., Fuller, G., & Woelm, F. (2023). Implementing the SDG stimulus. *Sustainable development report 2023*. Dublin University Press. https://doi.org/10.25546/102924

Sianturi, F. A. E., & Dwicaksono, A. (2023). Pengaruh akuntabilitas sebagai asas good governance terhadap pembangunan daerah di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, *6*(1), 38-59. https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.205

Siburian, M. E. (2022). Fiscal decentralization and regional income inequality: Evidence from Indonesia. *Applied Economics Letters, 29*(1), 89–92. https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1855299

Tirtosuharto, D. (2022). The impact of fiscal efficiency and poverty reduction in Indonesia: institutional factor and geographical differences. *Journal of Geographical Systems, 24*(1), 67–93. https://doi.org/10.1007/s10109-021-00359-1

Triwulandari, B. B., Boedirochminarni, A., & Firmansyah, M. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2013-2022. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, *7*(2), 175-187. https://doi.org/10.32487/jshp.v7i2.1747

United Nations. (2023). *The sustainable development goals report 2023: Special edition—Towards a rescue plan for people and planet*. United Nations. https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/